e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

TONGAUNA SEBAGAI BARATA KERAJAAN KONAWE PADA MASA PEMERINTAHAN *MOKOLE* TEBAWO: 1602-1668 M

Oleh:
Anita
Fatma
Khabiirun
(Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo)

Abstract

This research aims to determine the reasons of the choice of Tongauna as barata in the Konawe Kingdom during the reign of Mokole Tebawo and to explain the function of barata in government structures. This study used the historical method through five stages of work as follows (1) selection of topics, (2) collection of sources, (3) source criticism, (4) interpretation of sources and (5) historiography. The result whowed that (1) the reasons of Tongauna and were choosen as a barata region, namely: (1) starting from the village groupings (O'Kambo) led an elder called Tono Mutou, assisted by a Posudo,a Tolea a Mbuowai, a Mbuseha, a Tamalaki, and an Otudo and (b) those groups then developed to form a territory (small kingdom) and they appointed as a leader from among them (Primus Inter Pares) a leader who called "Mokolele" in several areas, (2) Tongauna functions as a barata area in the Konawe Kingdom were: (a) to maintain security and defense from various threats both from within and from outside and (b) to remain in unity, Mokole Tebawo developed a political strategy for his government which was called Siwole Mbatohu and Pitu Dula Batu.

Keywords: Barata region, Tongauna

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan terpilihnya Tongauna sebagai barata di Kerajaan Konawe di masa pemerintahan *Mokole* Tebawo. Serta, menjelaskan fungsi barata pada struktur pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan melalui lima tahapan-tahapan kerja sebagai berikut (1) Pemilihan topik, (2) Pengumpulan sumber, (3) Kritik sumber, (4) Interpretasi sumber, (5) Historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) latar belakang Tongauna sebagai wilayah barata, yakni: (a) Bermula dari pengelompokan-pengelompokan (O'Kambo) kampung yang dipimpin oleh seorang yang dituakan disebut Tono Mutou, dibantu oleh seorang Posudo, seorang Tolea seorang Mbuowai seorang Mbusehe, seorang Tamalaki, dan Otudo. (b) Kelompok inilah yang kemudian berkembang membentuk sebuah wilayah kekuasaan dan mereka mengangkat pemimpin dari kalangan mereka. Raja atau Mokolele yang dipilih merupakan pemimpin yang dapat melindungi kelompok. (2) Fungsi Tongauna sebagai daerah barata di Kerajaan Konawe; (a) untuk menjaga keamanan dan pertahanan dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar (b) agar tetap dalam persatuan maka Mokole Tebawo menyusun strategi politik pemerintahannya yang disebut Siwole Mbatohu dan Pitu Dula Batu.

Kata Kunci: Wilayah, Barata, Tongauna

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

1. PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya tidak dapat melepaskan diri dari sejarah, sebab sejarah merupakan petunjuk dalam perjalanan menyongsong kehidupan sekarang dan kehidupan akan datang. Sejarah membantu manusia memahami dan merekontruksi peristiwa. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau baik secara individual maupun kelompok, yang kemudian dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan di masa kini. Dalam perspektif kesejarahan, pembangunan di segala bidang kehidupan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan merupakan mata rantai perjalanan sejarah bangsa Indonesia pada masa lampau. Dengan demikian, pembangunan yang tengah dilaksanakan itu merupakan rangkaian perjalanan masa lampau dari bangsa yang bukan hampa akan nilai-nilai sejarah. Realitas kehidupan masa lampau yang dapat dipersaksikan hingga masa kini perlu kiranya diungkapkan secara jelas melalui penelitian ilmiah. Oleh karena itu, kehadiran ilmu sejarah sangat penting untuk mengungkapkan dan menuntun pemahaman tentang berbagai aktivitas manusia baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan segi politik maupun pertahanan keamanan.

Kerajaan Konawe terletak di jazirah daratan Sulawesi Tenggara. Pada zaman pemerintahan *Mokole* More Wekoila bersama telah menyatukan negeri-negeri di sekitarnya sehingga wilayahnya membentang luas. Kerajaan Konawe berpusat di Unaaha (yang sekarang Kabupaten Konawe). Penduduk asli yang mendiami Kabupaten Konawe pada saat itu adalah orang-orang Tolaki, yang mendiami pelosok-pelosok serta mendominasi kebudayaan Daerah Kabupaten Kendari sejak zaman dulu hingga sekarang.

Penduduk asli yang mendiami Kerajaan Konawe adalah suku Tolaki, bila dilihat dari ciri-ciri biologisnya seperti, mata, rambut, maupun warna kulit, memiliki kesamaan dengan ras Mongoloid diduga berasal dari asia timur, dari Jepang dan kemudian disebarkan ke selatan melalui kepulauan Riukyu, Taiwan, Fhilipina. Ada juga yang menyatakan bahwa perpindahan pertama berasal dari Yunan (RRC) ke selatan Philipina, sulawesi utara ke pesisir Timur Halmahera. Pada saat memasuki daratan Sulawesi Tenggara masuk melalui muara sungai Lasolo dan Konawe dinamakan Andolaki. (Tamburaka, 1993: 5).

Orang Tolaki dianggap oleh sebagian masyarakat di Sulawesi Tenggara sebagai penduduk asli di daratan Sulawesi Tenggara karena termasuk penduduk tertua di wilayah tersebut. Orang Tolaki memenuhi pelosok-pelosok desa serta mendominasi kebudayaan Kabupaten Konawe sejak dahulu hingga sekarang ini. Di dalam berinteraksi antara sesama melahirkan kelompok-kelompok masyarakat dan tumbuh serta berkembang di desa tempat tinggalnya.

Menjelang pertengahan abad XVI Kerajaan Konawe diperintah oleh *Mokole* Melamba. Melamba bersaudara dengan Halu Oleo yang kemudian menjadi Sultan Buton I dengan gelar Murhum. Pada jaman Melamba, Kerajaan Konawe mencapai wilayahnya yang terluas yaitu seluruh jazirah Tenggara Sulawesi minus Mekongga di dekat Kolaka sekarang. Pada kira-kira pertengahan abad ke XVII di jaman pemerintahan Tebawo (gelar sesudah wafatnya Sangia Inato) terjadi perubahan sturuktur pemerintahan. Mulai saat itu dikenallah dalam kehidupan Kerajaan Konawe adanya: Siwole Mbatohuu dan Pitu Dula Batu. Siwole Mbatohuu adalah empat wilayah Konawe (Burhanuddin, 1997:31) yaitu:

a. *Tambo I Losoano oleo*, (gerbang timur) yaitu Ranomeeto dengan pimpinannya bergelar Sapati.
b. *Tambo I Tepuliano oleo*, (gerbang barat) yaitu Latoma dengan pimpinannya Sabandara.
c. Barata *I Hana* (sayap kanan) yaitu Tongauna yang di pimpin oleh Penggawa.
d. Barata *I moeri* (sayap kiri) yaitu asaki dengan kepalanya Inowa.

Pengibaratan Kerajaan Konawe sebagai suatu *Siwole* (talam persegi empat) dapat dilihat dengan adanya pembagian kerajaan ke dalam empat wilayah pemerintahan. Pembagian tersebut semacam pemberian otonomi kepada wilayah-wilayah tersebut. Ditinjau dari nama segi kesatuaan wilayah Tambo dan Barata yang berarti gerbang dan sayap, di dalamnya terkandung pengertian

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

otonomitas dan unsur pertahanan dan kepentingan perekonomian. Pada kenyataan selanjutnya sesudah itu wilayah ini menampakkan otonomitas dalam mengatur diri malah mempunyai elite tersendiri dan pengangkatan kepala pemerintah diatur sendiri pula. Jika dilihat dari sudut gelar pimpinannya maka dapat dipastikan bahwa jabatan ini sebelum penetapan Siwole Mbatohuu adalah merupakan jabatan "Kabinet" Kerajaan Konawe.

Mokole Tebawo naik tahta menjadi raja Konawe ke-21 menggantikan kakeknya Melamba pada tahun 1602. (Melamba, dkk, 2017) M*okole* Tebawo menjadi raja di kerajaan Konawe dan membawa kerajaan Konawe mengalami masa kejayaan pada akhir abad XVII dengan menerapkan struktur pemerintahan yang diterapkannya mampu menciptakan stabilitas keamanan dan menjadikan kerajaan Konawe mengalami perkembangan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya yang besar sehingga ia diberi gelar seorang raja termasyhur.

Praktek kepemimpinan yang dijalankan seorang pemimpin patut ditiru sebagaimana yang dijalankan *Mokole* Tebawo yang disebut dengan *Mohopulei Wonua, Mombulesako toono nggapa*, dan *Mosiwi-siwi toono Meohai*, merupakan potensi politik yang menjadi faktor strategis bagi pengembangan jiwa, dan semangat kerukunan masyarakat, bangsa dan Negara (Tarimana, 1989 :75) Maksudnya seorang pemimpin harus mampu membina, mengayomi negeri dan penduduknya, agar senantiasa dalam keadaan yang kompak dan bersatu. Dengan model kepemimpinan tradisional seperti ini terbukti *Mokole* Tebawo mampu mengantarkan Kerajaan Konawe dikenal oleh kerajaan-kerajaan tetangganya dan menjalin hubungan bilateral dengan kerajaan Mekongga, Gowa, Bone, Luwu, Moronene, Muna, Buton, Banggai, dan Ternate.

Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah politik yang berfokus pada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan negara-negara dan proses politik formal. Pendekatan strukturis seperti yang dikemukakan oleh (Leirissa1996: 12) menjelaskan bahwa terdapat tiga domain dalam penelitian sejarah yakni domain peristiwa, domain struktur, dan domain strukturis. Penelitian ini menggunakan pendekatan strukturis yang mempelajari peristiwa dan struktur sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi artinya peristiwa mengandung kekuatan mengubah struktur sedangkan struktur mengandung hambatan atau dorongan bagi tindakan perubahan dalam masyarakat. Pendekatan strukturis memandang pelaku sejarah tidak dapat dipisahkan dari struktur. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa ciri pendekatan strukturis yaitu (1) yang di pelajari adalah struktur dan peristiwa, dan (2) menjawab pertanyaan apa, kapan, siapa, dan di mana. Oleh karena itu, untuk mendukung penelitian ini, maka sumber data penelitian ini akan mengacu pada tiga kategori sumber yakni sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber visual Sumber tertulis, yakni data tertulis diperoleh dari sumber dokumen, dan kepustakaan, seperti buku-buku, laporan hasil penelitian. Sumber lisan, yakni data yang diperoleh melalui keterangan lisan (Wawancara) dengan para Informan di antaranya tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat dan masyarakat umum. Sumber Visual, yakni data yang diperoleh melalui hasil pengamatan sejarah benda-benda peninggalan sejarah yang dihasilkan seperti ornamen, rumah adat istiadat, bangunan-bangunan rumah masyarakat Konawe.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Konawe. Di kantor Kepustakaan, Museum Sulawesi Tenggara, Perpustakaan Universitas Halu Oleo, Perpustakaan FIB, dan Laboraturium Ilmu Sejarah. Selain itu penelusuran sumber juga dilakukan di bekas-bekas wilayah Kerajaan Konawe yang sekarang ini sudah terbagi menjadi beberpa Kabupaten, seperti Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, dan kota Kendari. Alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Kabupaten KOnawe merupakan lokasi kerjaan Konawe Berada serta untuk melengkapi data, diperlukan arsip-arsip sejar yang berada pada perpustakaan dan laboratorium-laboratorium sejarah.

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

2. PEMBAHASAN

2.1 Latar Belakang *Mokole* Tebawo Menjadikan Tongauna Sebagai daerah Barata di Kerajaan Konawe

Bermula dari pengelompokan-pengelompokkan (*O'Kambo)* kampung yang dipimpin oleh seorang yang dituakan disebut *Tono Mutou*, dibantu oleh seorang *Posudo*, seorang *Tolea* seorang *Mbuowai*, seorang *Mbusehe*, seorang *Tamalaki*, dan *Otudo.* Setelah beberapa puluh tahun kemudian atas dasar musyawarah dan mufakat antara kepala-kepala unit pemukiman *Tono Motuo*, yang saling berdekatan wilayah untuk membentuk pemerintahan dengan wilayah yang lebih luas yang disebut *Otobu* sekaligus memilih seorang pemimpin yang disebut *Pu'utobu* yang dibantu oleh seorang *Owati.* Kelompok inilah yang kemudian berkembang membentuk sebuah wilayah kekuasaan (Kerajaan kecil) dan mereka mengangkat pemimpin dari kalangan mereka (Primus Inter Pares) pemimpin yang dapat melindungi kelompok, seorang Raja yang disebut "*Okolele*" di beberapa wilayah. Adapun wilayah-wilayah pengelompokkan yang berhasil membangun Kerajaan ialah mereka yang berada di Padangguni atau kecamatan Abuki sekarang yakni Kerajaan Padanggumiyang dipimpin oleh seorang Mokole (Raja) bernama Ramandalangi yang bergelar *Ndotongano* Wonua, kemudian mereka yang berada disekitar daerah Lasolo atau pusat pemerintahannya disekitar pantai Wawolasea atau Kecamatan Lasolo sekarang, dengan menamakan Kerajaan mereka sebagai "Mokole I Wawolesea" yang dipimpin oleh Atitisima, kemudian Kerajaan kecil Besulutu yang berpusat disekitar desa Besulutu kecematan Besulutu sekarang ini yang menamakan diri Mokolele I Besulutu yang dipimpin oleh *Mombeeti*, dan konon ada lagi satu Kerajaan kecil orang Tolaki yang berdiri disekitar daerah Moramo sekarang, yang menamakan dirinya Mokolele I Tambosupa (Muslimin Su'ud, 1992).

Setelah Wekoila diangkat sebagai Mokolele, ia segera melaksanakan penataan sistem pemerinatahan secara teratur dengan mengangkat seorang wali dan beberapa orang Toono motuo (orang yang dituakan). Wilayah kekuasaannya terdiri dari beberapa kampung yang disebut O'kambo, yang dibantu oleh Tomalaki (Panglima perang), O'tadu (ahli siasat perang), tolea (penghulu perjodohan), pabitara (juru bicara adat), Mbuakoy (ahli kesehatan), Mbusehe (ahli perdamaian), Posudoho (logistic/perlengkapan). Ia juga mulai memperkenalkan sistem pembagian kekuasaan berdasarkan sistem kasta dengan membagi masyarakat dalam tiga tingkatan golongan atau sturuktur sosial yaitu, Golangan bangsawan (anakia) yaitu mokolele dan keluarganya, yang berhak untuk diangkat menjadi pemegang kekuasaan memerintah. Golongan menengah yang berfungsi sebagai aparat pelaksana kekuasaan Raja (penyelenggara pemerintahan yang disebut golongan *Too Mootuo* (Muslimin Su'ud, 1992: 146). Golongan *Toono ongapa* inilah oleh penulis memasukkan mereka sebagai rakyat biasa yang berfungsi sebagai rakyat pelaksana pemerintah Raja yang disebut *Toono dadio.* Dan golongan yang disebut *O'ata.*

Sistem pembagian kekuasaan dan wilayah pemerintahan yang sederhana yaitu atas beberapa O'kambo yang dipimpin oleh seorang Toono motuo, kemudian membagi wilayahnya dalam beberapa pusat pemerintahan bawahan yang mengawasi. Mengenai sturuktur/biokrasi pemerintahan Raja Wekoila terdiri dari beberapa pusat pemerintahan bawahan yang mengawasi beberapa wilayah perkampungan Toono motuo, dengan sebutan Puu tobu (setingkat wilayah kecamatan), tingkat pembagian wilayah kekuasaan Kerajaan Konawe dimasa pemerintahan Raja Wekoila, hanya terdiri dari beberapa wilayah mokolele kecil (Puutubo wonua) terdiri dari: Mokolele Laronii (Unaaha/Puosu), Mokole Asohi, Mokole Tinondo, Mokole Puriala di Lambuya Selatan, Mokole I Angata di Angata, Mokole I Landono, Mokole I Andolo/Anggapaaha, Mokole I Lawata di bagian Wiwirano, Mokole I Sambaosu (Walay), Mokole Bandaena di pantai Lasolo

Pembagian Kerajaan Konawe dalam wilayah Puutobu wonua (Mokole kecil) yang masing-masing membawahi beberapa okambo (kampung) belum begitu berfungsi secara efektif hingga

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

Ramandalangi dan Wekoila tidak bisa lagi diketahui identitas mereka, sehingga Ramandalangi digelar "Langgai Moriana" artinya Raja yang menghilang, sedang isterinya Wekoila disebut "Sangia I Wekoila artinya Raja Puteri yang menghilang. Peristiwa menghilangnya mereka ini dari tanah Konawe menurut Burhanuddin (1966) dalam bukunya menapak jejak Sejarah Tomanurung diduga karena dipanggil pulang ke pusat Kerajaan Kediri di jawa atau ke tanah Toraja.

Kepergian mereka menyebabkan Kerajaan Konawe mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan antara turunan Kerajaan Luwu-Tolaki kemudian yang memerintah di Kerajaan Konawe pada saat itu belum ada pendukungnya, hingga akhirnya didapatkan keterangan lisan dari beberapa sumber bahwa pada saat ini Kerajaan Konawe dilandah wabah penyakit tibalah seorang laki-laki perkasa dan memiki kesaktian yang dperkirakan berasal dari luar yang memiliki kesaktian. Onggabo tiba di Unaaha sekitar abad ke-15, Onggabo berhasil membebaskan Kerajaan Konawe dari wabah penyakit, mengembalikan penduduk dari pengungsian, beberapa bukti yang dapat ditemukan dari perjalanan Onggabo dalam upaya membebaskan rakyat Kerajaan Konawe dari wabah penyakit dan pengungsian adalah ditemukannya bekas jemuran pakaian Onggabo yang telah berubah bentuk jadi batu dan batu besar bekas mainan "Mekadawu" Onggabo yang dapat ditemukan diperbatasan daerah Kecamatan Amonggedo dan Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe. Setelah berhasil memulihkan keadaan dalam negeri, beliau kembali ke Unaaha dan mengatur kembali pemerintahan Kerajaan Konawe.

Pemerintahan Onggabo kemudian digantikan oleh Melamba. Selama masa pemerintahan Melamba, Kerajaan Konawe pernah mendapat serangan bajak laut Tobelo. Dikemukakan Tamburaka (1985 : 17) bahwa gangguan keamanan yang dilancarkan bajak laut Tobelo tidak hanya dirasakan Kerajaan Konawe tetapi juga Kerajaan-Kerajaan lainnyadi Sulawesi Tenggara. Serangan bajak laut tersebut di maksudkan untuk mempertahankan hegemoni Ternate di kawasan Timur Nusantara.Hal ini dapat dilihat pada saat Tobelo menyerang Wonua Sampara pada abad XVI.

Setelah Melamba, maka naiklah *Mokole* Tebawo menjadi Raja di Kerajaan Konawe dan membawa Kerajaan Konawe mengalami masa kejayaan pada akhir abad XVII dengan menerapkan sturuktur pemerintahan yang diterapkannya mampu menciptakan stabilitas keamanan dan menjadikan Kerajaan Konawe mengalami perkembangan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya yang besar sehingga ia diberi gelar seorang Raja termansyur.

1. Sturuktur Pemerintahan Kerajaan Konawe

Kerajaan Konawe diperintah oleh seorang Raja yang disebut *Mokole*. Tahta Kerajaan Konawe pernah didududki oleh seorang wanita bernama Wekoila yang juga disebut "Tomanurung", artinya orang yang turun dari langit atau kayangan. Demikianlah misalnya Kerajaan Bone mengenal beberapa orang Raja atau Raja perempuan yang terkenal didalam Sejarah, antara lain: We Banriagau Daeng Marowa Agung Majang (Ratu Bone yang ke empat), We Tenrituppu Mattinrowe ri Sidenreng (Ratu Bone ke sepuluh) dan seterusnya.

Telah diuraikan bahwa pada masa Raja Wekoila sturuktur biokrasi pemerintahan sangat sederhana dengan membagi wilayah atau daerah atas beberapa o'kambo setingkat wilayah tobu dipimpin oleh Toono motuo dengan sebutan Puutobu Wonua yang bertindak sebagai penguasa bawahan dari pusat negeri Wonua Kerajaan Konawe, wilayah puutobu Wonua membawahi beberapa o'kambo semacam desa (napo). Menurut Muh. Gazali, dkk. (1992 : 12-13) bahwa sturuktur pemerintahan Wekoila adalah:

a. Toono Motuo sebagai penguasa wilayah dibawah Kerajaan.
b. Tolea Posudo selaku pembantu Toono Motuo dalam konteks sosial.
c. Tamalaki dan atadu mengurus bidang keamanan Negara.

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

Akhir masa kekuasaan Raja Wekoila tidak diketahui secara pasti, namun beberapa sumber lisan menyatakan bahwa setelah pemerintahan Wekoila berakhir terjadi kevakuman beberapa tahun lamanya, namun berakhir setelah munculnya Onggabo yang menyelamatkan wilayah Kerajaan Konawe dari kehancuran. Onggabo adalah seorang laki-laki yang mempunyai perawakan tinggi dan besar. Onggabo berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk membangun kembali Kerajaan Konawe dari puing-puing kehancuran. Onggabo kemudian menyusun kembali sturuktur pemerintahannya dengan tetap berpedoman pada sturuktur pemerintahan Wekoila. Pada masa pemerintahan Onggabo wilayah Kerajaan Konawe meliputi daratan Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari yang berada di pesisir pantai dengan pusat pemerintahannya berada di Unaaha.

Kerajaan Konawe mulai mengalami puncak perkembangannya pada masa pemerintahan *Mokole* Tebawo. Menurut Djohan Mekuo (1971) bahwa *Mokole* Tebawo menduduki tahta Kerajan Konawe pada tahun 1621 ketika itu beliau berumur 14 tahun, pendapat senada dikemukakan Muslimin Su'ud (1987) Mokole Tebawo naik tahta pada tahun 1621 dan meninggal dunia pada tahun 1671. Setelah Mangkat, maka pemerintahan dikendalikan sementara oleh istrinya bernama Maago, yang menurut sumber di Kerajaan Bone disebut We Tenri Maago Dungeng.Kendali pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada Lakidende, Mokole inilah yang pertama menyatakan agama Islam sebagai agama Kerajaan Konawe.

Sederet Raja yang memerintah, masih tetap berpedoman pada sturuktur pemerintahan Wekoila dan mengalami perubahan pada masa Raja Larebi, Raja Tebawo dengan gelar Sangia Inato/I Tahiyai, I Ndahului Tanggokoroi, Melaalaa. Dalam buku Dowunta DPRD TK I Sultra 1982, bahwa sturuktur pemerintahan Kerajaan Konawe pada masa Raja Tebawo, organisasi pemerintahan disusun berdasarkan "*Siwole Mbatohui*" dan "*Pintu Dula Batu*" artinya Talam anyaman persegi empat.

Keseluruhan wilayah kekuasaan Kerajaan Konawe dibagi atas 4 (empat) wilayah besar pemerintahan daerah bawahan, yang disebut Siwole Mbatohu (talam persegi empat). Dua di antaranya yaitu, wilayah bagian kanan (Utara) Kerajaan Konawe yang disebut dengan Bharata *I'hanano Wuta* Konawe, yang berkedudukan di Tongauna dengan pimpinannya bergelar Ponggawa, dan wilayah bagian kiri (Selatan) Kerajaan Konawe yang disebut dengan Bharata *I'moerino Wuta* Konawe, yang berkedudukan di Asaki Lambuya dengan pimpinannya bergelar Inowa.

Pembentukan wilayah Barata Tongauna di Kerajaan Konawe dimaksudkan agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik sebab wilayah kerajaan Konawe sangat luas guna menghindari timbulnya konflik dalam kerajaan. Pembentukan wilayah barata juga bertujuan menjaga wilayah kerajaan dari gangguan yang sewaktu-waktu mengancam Kerajaan Konawe dengan menempatkan seorang penguasa wilayah yang bertanggung jawab terhadap wilayah kekuasaannya. Pusat pemerintahan berada di Unaaha. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi politik dan pertahanan keamanan agar wilayah Kerajaan Konawe aman dan tentram sebagaimana mempertahankan diri yang dilakukan oleh suatu daerah atau Negara terhadap ancaman dari bangsa lain. (Salim 1991).

2. *Siwole* Mbatohu sebagai Sistem Pemerintahan Dan Pertahanan Kerajaan Konawe

Pada perekembangan sejarah terjadilah penggabungan beberapa wouna (negeri) kerajaan dalam suatu kerajaan yaitu Kerajaan Konawe telah terjadi perang diantara beberapa kerajaanyang ada seperti kerajaan Wawolesea, Kerajaan Besulutu, kerajaan Padangguni.Setelah beberapa lama datanglah seorang putribernama Wekoila di Kerajaan Padangguni yang kemudian setelah melalui beberapa persyratan karena persamaan derajat diantara mereka putri Wekoila tersebut di peristrikan Totongano Wonua atau Ramandalangi, dengan adanya penggabungan ini wilayah federasi Wonua itu semakin bertambah luas.

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

Setelah Wekoila atau seorang wanita tampil ke muka menjadi raja, memegang tampuk pimpinan mengkoordinasikan pemerintahan, dengan menyusun sturuktur pemerintahan yang sederhana dan belum di kenal Siwole Mbatoku O'pitu Dula Batuno Wuta Konawe (empat sisi/sayap/barata wilayah besar dan 7 kementrian Negara Kerajaan Konawe).

Dalam tradisi lisan masyarakat Tolaki menuturkan sesungguhnya konsep sistem pemerintahan Siwole Mbatoku dan O'pitu Dula Batuno Wuta Konawe telah dipersiapkan jauh sebelum Sangia Inato dilantik menjadi *Mokole* oleh pendahulunya, *Mokole* Maogo dengan gelar Sangiam Mbinanti (Raja yang dipayungi) akan tetapi dalam bentuknya yang belum lengkap dan pelaksanaannya belum efektif, *dengan hirarki* sebagai berikut:

1). Pembagian pusat-pusat pemerintahan di bawah pimpinan Mokole-mokole/Raja-raja pusat yaitu:

1. Pemerintahan pusat dipegang oleh Mokole I'Larisomba, Anahia Meita.
2. Pemerintahan daerah/wilayah dipegang oleh Ndutungano Wonua.
3. Pemerintahan daerah Kerajaan Konawe yang saat itu disebut Anangguro Motipu Wuta I Konawe, Wonua Mggaluku Lipu I'Laronii I'Unaaha.
   a. Wilyah-wilayah kekuasaan/Kerajaan lokal yang terdiri dari:
      1. Wulele NggasuDewa, Wua Nggasa Wula yang berpusat di Mowewe.
      2. Pano Dewa Wula yang berpusat di Andoolo.
      3. To Lalo Nggasu Wula, yang berpusat di Alosika (Abuki) yang dibantu oleh turunan toono motu'o di Walay.
      4. Meosadaki isi peopati Mohewu, berkedudukan di Puriala
      5. Tamburu Nggasu Dawa, pala Mbala Mengga berkedudukan di Asohi.
      6. Polia-lia langi Anasomba Wulaa berkedudukan di Arombu dibagian hulu sungai Konaweha.
      7. Tuudu Mbasi (pelabuhan laut) di Molawe sekarang desa Molawe Lasolo. (Abbas. B, 1989:35)

2.2 Fungsi Daerah Barata Tongauna bagi Kerajaan Konawe Pada Masa Pemerintahan *Mokole*Tebawo :1608-1668

1. Tongauna Sebagai Daerah Barata

Wilayah Barata Tongauna merupakan daerah pada suatu wilayah di kerajaan Konawe yang dijadikan sebagai daerah pertahanan dan keamanan. Jika ditinjau dari segi pertahanan, maka letaknya sangat strategis karena letaknya berada di tengah-tengah kekuatan politik kerajaan lain, sedangkan ibu kota Kerajaan Konawe di Unaaha terletak di tengah-tengah wilayah pada daratan luas yang diapit oleh dinding alam berupa hutan dan pegunungan. Dengan pertimbangan luas wilayah Kerajaan Konawe yang meliputi daratan Sulawesi Tenggara, serta guna menjaga keamanan wilayah kerajaan dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar agar tetap dalam persatuan, maka *Mokole* Tebawo menyusun strategi politik pemerintahannya. Strategi tersebut disebut Siwole Mbatohuu dan Pitu Dula Batu yakni membagi empat wilayah pemerintahan agar pemerintahan mudah dikontrol. Pemerintahan tingkat Wonua (negeri) dipimpin oleh seorang raja sebagai pemimpin tertinggi berkedudukan di Unaaha dibantu seorang Sulemandara sebagai wakil raja. Seorang *Mokole* mempunyai fungsi mengayomi serta melindungi seluruh rakyatnya (Makfud, wawancara 19 Mei 2019).

Pemerintahan di tingkat daerah terdiri dari empat wilayah yakni gerbang timur di Ranomeeto, gerbang barat di Tongauna, Barata I Hana di Anggaberi dan Barata I Moeri di Asaki Lambuya, masing-masing dipimpin seorang raja bawahan. Para raja menjalankan pemerintahan di daerah dengan membawahi beberapa wilayah puutobu. Pitu Dula Batu sebagai aparat kerajaan sebagai

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

pembantu raja dan menjalankan fungsinya dalam bidang pertahanan didarat dan di laut, mengurus bidang ekonomi, menyelesaikan masalah peradilan adat, melayani masyarakat yang mencari keadilan, dan memelihara hubungan baik antar warga. Pemerintahan O,Tobu yang dipimpin seorang Puutobu setingkat kecamatan, pemerintahan O'napo setingkat desa dan pemerintahan Anggalo setingkat kampung (Makfud, wawancara 19 Mei 2019)

Pada akhir abad ke XVII kerajaan Konawe mengalami perkembangan pesat ditandai dengan kemajuan dalam berbagai bidang baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Hal ini tidak terlepas dengan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh seorang pemimpin kerajaan dalam hal ini *Mokole* dikerajaan Konawe. Dengan naiknya Tebawo sebagai Mokole di kerajaan Konawe, maka beliau segera melakukan perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan dengan belajar dari pengalaman pemerintahan yang dijalankan oleh pemimpin sebelumnya. Munculnya seorang pemimpin sangat diperlukan dalam keadaan-keadaan dimana kelompok sosial yang bersangkutan terhalang atau apabila kelompok tadi mengalami ancaman dari luar, sehingga muncullah seseorang yang mempunyai kemampuan menonjol yang diharapkan akan menanggulangi segala kesulitan-kesulitan yang ada (Soekanto,2013).

Dengan kondisi kerjaan Konawe yang sering mendapatkan ancaman dari luar maka *Mokole* yang baru diangkat segera menyusun sistem pemerintahan dimana sebelumnya kerajaan Konawe mengalami kemunduran akibat perang saudara dengan kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Belajar dari pemerintahan sebelumnya maka raja Tebawo segera menyusun sistem pemerintahan kerajaan Konawe yang dikenal dengan Siwole Mbatohu dan Pitu Dula Batu dalam bahasa Tolaki artinya talam persegi empat dan tujuh wadah batu. Yaitu suatu wilayah kekuasaan kerajaan yang berbentuk segi empat seperti siwole berupa wadah anyaman yang terbuat dari daun agel yang biasa digunakan untuk meletakkan kalo sara. (Akib Moita, wawancara 19 mei 2019)

Wilayah Kerajaan Konawe secara geografis adalah merupakan daratan yang cukup luas sehingga menyulitkan untuk mengontrol wilayah dan menjalankan kebijakan di daerah-daerah serta banyak yang berkunjung di daerah ini bahkan niat untuk menguasai Kerajaan. Kondisi geografis yang tercipta mendorong *Mokole* Tebawo mengambil kebijaksanaan untuk membagi wilayah Kerajaan dengan empat sisi/empat wilayah, empat sayap yang dikenal *Siwole* Mbatohuu.

Istilah *Siwole* Mbatohuu adalah semacam talam persegi empat yaitu pemerintahan yang dilakukan dari empat penjuru wilayah kekuasaan yang besar terdiri : (1) Tambo I Losoano Oleo adalah pintu sebelah timur, tempat terbitnya matahari berkedudukan di Ranomeeto dengan pimpinannya bergelar Sapati (2) Tambo I Tepuliano Oleo adalah pintu sebelah barat, tempat terbenamnya matahari berkedudukan di Wowa Latoma dengan pimpinannya bergelar Sabandara (3) Barata I Hana (bintara sebelah kanan atau sayap kanan berkedudukan di Tongauna yang pimpinannya bergelar Ponggawa (4) Barata I Moeri (bintara sebelah kiri atau sayap kiri) berkedudukan di Asaki dengan pimpinannya bergelar Inowa. Kerajaan Konawe ini dibagi atas beberapa wilayah besar kekuasaan Kerajaan, dengan maksud untuk mewakili raja (Mokole) dalam mengkoordinasikan pemerintahan secara efektif dan efesien pada daerah-daerah tersebut sebagai perpanjangan tangan *Mokole*.

Adapun empat wilayah besar kerajaan Konawe pada masa pemerintahan *Mokole Tebawo*terdiri dari:

a. Sapati Ranomeeto

Istilah tambo I Losoano Oleo adalah pintu terbitnya matahari, yaitu wilayah kekuasaan sebelah timur Kerajaan Konawe, biasa juga dikenal Metombi-tombi Nggilo, Mebandera Wulaa, Tambo I Losoano Oleo, yang bergelar Sapati. Sapati ini dikenal nama samarannya Kowuna Nggona'ia I Ranomeeto, yaitu bamboo yang mempunyai bunyi sangat merdu sekali di Ranomeeto. Pemerintahan Sapati Kowuna Nggonala berkedudukan di Pu'u Mbopondi Ranomeeto sekarang dengan pejabat-pejabatnya berturut-turut adalah: (1) Sorumba, (2) Melamba, (3) Malandeo.

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

b. Sabandara Latoma

Istilah tambo I Tepuliano Oleo adalah pintu terbenamnya matahari, yaitu wilayah kekuasaan sebelah barat Kerajaan Konawe, yang dikuasai seorang Raja yang bergelar Sabandara. Sama halnya Sapati, oleh Sabandara ini dikenal dengan nama samarannya "Toune Napo Wulaa, Ore-ore Mebubu, Tambo Latoma, Tambo I Tepuliana Oleo, yang berkedudukan di Wowa Latoma (Kondara'asi) berada dalam wilayah Kecamatan Latoma sekarang.

Pemerintahan wilayah Kerrajaan Sabandara di Latoma membawahi beberapa pemerintahan wilayah puutobu yaitu: 1) Wiwirano, 2) Ambekairi, 3)Asila Waworaha, 4)Arombu, 5)Ue'esi, serta 6) Asera. Demikian Raja Sabandara berkuasa atas wilayah-wilayah tersebut dan bertanggung jawab langsung kepada *Mokole* Kerajaan Konawe di Unaaha.

c. Ponggawa Tongauna

Biasa dikenal melingge-lingge Bara Metuka Ndambosisi, Tambosisiruromoro Opua Mepambali Bharata I hana, istilah Barata I hana adalah bagian kanan, yaitu wilayah kekuasaan sebelah utara Kerajaan Konawe, yang dikuasai oleh seorang Raja yang bergelar Ponggawa I una ini, dan berkedudukan di Lalonggowuna, Tongauna. Ponggawa I una ini, memiliki dan membawahi beberapa pemerintahan wilayah puutobu yaitu: 1) Anggaberi, 2) Toriki, 3) Wawotobi, 4) Kasipute, 5) Lasolo. Sebagaimana halnya seperti Sapati dan Sabandara tersebut di atas berkuasa dan bertanggung jawab kepada mokole Kerajaan Konawe. Pemerintahan Ponggawa I Una ini, dijabat oleh beberapa orang secara berurutan mulai pejabat pertama hingga terakhir adalah 1) Paluwu, 2) Masigi, 3) Langgonai, 4) Moita, 5) Wuahomo, 6) Lagarai, 7) Ndariala, 8) Watumakila, 9) Latamua (Latamua ini menjabat sebagai kepala distrik Tongauna) dilanjutkan Tedombo.

d. Inowa Asaki Lambuya

Biasanya disebut Toremba-remba Nggilo, Toko Wala Wulaa, Merembi-rembi Eno mekalambi Wulaa rambaha Monggasona wuta Konawe yang disebut "Kapita Anamolepo Wuta I Asaki dengan pimpinan pertamanya Kapita Taridala. Kemudian empat tahun kemudian setelah Taridala berangkat ke Pitumpanua (Kolaka Utara) dengan membawa pasukan 3.000 orang untuk merebut kembali Pitumpanua (tujuh Negeri) dan Asera (Sembilan Negeri) karena memberontak. Kapita ini diganti oleh Mbanahi saudara sepupu sekalinya anak dari Togala, sehingga diberi gelar Ana pineo Towaani (Ana Inowa-owa) yang artinya anak yang diharapkan menjalankan tugas yang dilimpahkan kepadanya. Dengan pengerian ini maka pusat pemerintahan dipindahkan dari uepay ke Puriala dengan gelar Mbanahi yang disebut "Meosadaki isi, Meopati Mehowu, Ana Pineo Towaani I Purialan". Daerah kekuasan Inowa Asaki meliputi 5 wilayah Puutobu, yaitu: 1) Puriala, 2) Angata, 3) Benua, 4) Rate-rate, dan 5) Andoolo.

Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi politik dan pertahanan keamanan agar wilayah kerajaan konawe aman dan tentram sebagaimana dikatakan bahwa "Pertahanan mengandung pengertian sebagai perlindungan untuk mempertahankan diri yang dilakukan oleh suatu daerah atau Negara terhadap ancaman dari bangsa lain.(Salim, 1991).Lebih lanjut dikatakan bahwa "Pertahanan adalah bagian dari strategi yang mengacu kepada arah pencapaian tujuan.Pertahanan merupakan dasar bagi perencanaan untuk persiapan perang".(Suyohadiprodjo, 1985).

Penyusunan struktur pemerintahan ini dimaksudkan agar kerajaan Konawe terhindar dari usaha kerajaan-kerajaan lain melakukan invasi, mengingat wilayah kerajaan Konawe kaya akan sumber daya alamnya dan terkenal sebagai lumbung padi. Untuk menciptakan suatu kondisi bangsa dan Negara yang aman, hanya dapat dicapai melalui upaya mempertahankan diri dari berbagai bentuk ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam. Guna menjalankan roda pemerintahan di daerah maka diangkatlah seorang pimpinan dengan status raja bawahan yang bertanggung jawab langsung kepada Mokole di Unaaha. Penempatan

e-ISSN 2614-4395
p-ISSN 2598-7828

unaaha sebagai ibukota kerajaan dilihat dari posisi strategis keamanan dan pengembangan wilayah kerajaan, demikian pula dari segi administrasi pemerintahan dan pertimbangan sosial politik maupun sosial budaya dimana kota Unaaha terletak di tengah-tengah wilayah dari siwole mbatohu. (Jabal Nur, wawancara 20 Mei 2019 pukul 10.00-12.00 WITA).

3. PENUTUP

Latar belakang *Mokole* Tebawo menjadikan Tongauna sebagai Barata Kerajaan Konawe. Dengan pertimbangan luas wilayah Kerajaan Konawe yang meliputi wilayah Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan serta kota Kendari, serta keamanan akibat ancaman dari luar maka *Mokole* Tebawo menyusun strategi politik pemerintahannya yang disebut Siwole Mbatohuu dan Pitu Dula Batu agar pemerintahan mudah dikontrol. Pembentukan wilayah Barata Tongauna di Kerajaan Konawe dimaksudkan agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik sebab wilayah kerajaan Konawe sangat luas guna menghindari timbulnya konflik dalam Kerajaan serta menjaga wilayah Kerajaan dari gangguan yang sewaktu-waktu mengancam Kerajaan Konawe dengan menempatkan seorang penguasa wilayah yang bertanggung jawab terhadap wilayah kekuasaannya.

Fungsi Barata Tongauna bagi Kerajaan Konawe pada masa pemerintahan *Mokole* Tebawo. Dengan pertimbangan luas wilayah kerajaan Konawe yang meliputi daratan Sulawesi tenggara, serta guna menjaga keamanan wilayah kerajaan dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar agar tetap dalam persatuan maka *Mokole* Tebawo menyusun strategi politik pemerintahannya yang disebut *Siwole* Mbatohuu dan Pitu Dula Batu yakni empat wilayah pemerintahan agar pemerintahan mudah dikontrol. Pemerintahan tingkat Wonua (negeri) dipimpin oleh seorang raja sebagai pemimpin tertinggi berkedudukan di Unaaha dibantu seorang Sulemandara sebagai wakil raja. Seorang *Mokole* mempunyai fungsi mengayomi serta melindungi seluruh rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Burhanuddin B. *Jejak Sejarah Tomanurung* (AwalSejarah Kerajaan-Kerajaan Sulawesi Selatan Tenggara), Yayasan Kendari, 1997.

Kuntowijoyo.2013. *Pengantar Ilmu Sejarah.*Yogyakarta : Tiara Wacana

2003. *Metodologi Sejarah: Edisi Kedua.* Jakarta: Tiara Wacana.

Lerissa, R.Z 1996. *Metode Penelitian Sejarah* .Makalah disampaikan Dalam Bimbingan Teknik Dalam Kesejarahan.Cisaru Bogor Juni21-22

Muslimin Su'ud, 1992. *Aneka Ragam Kebudayaan Tolaki.* Kendari: Balai Penelitian Universitas Halu Oleo.

_____,1987, *Kepemimpinan Adat Kalosara pada Masyarakat Tolaki* di Kabupaten Kendari, Balai Penelitian Universitas Haluoleo, Kendari.

Notosusanto, Nugroho, 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu.

Tamburaka, Rustam E. 2004. *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 40 Tahun Sultra Membangun.*

Tarimana, Abdurrauf, 1993. *Kebudayaan Tolaki.*

Uchajana, Onong Effendy. 1981. *Kepemimpinan dan Komunikasi*. Bandung: Bina Insan.